

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan fenomena kehidupan manusia yang pada umumnya menggambarkan ketidakmampuan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar, biasanya kemiskinan identik dengan kelaparan dan tidak bisa mengendalikan sumber daya yang ada. kemiskinan berkaitan dengan situasi ketidakberdayaan yang mengakibatkan ketidakmampuan orang atau sekelompok orang untuk dapat melindungi dirinya sendiri sehingga mereka rentan terhadap goncangan kekerasan dan kriminalitas.

Kemiskinan merupakan persoalan yang multidimensional yang tidak saja melibatkan faktor ekonomi, tetapi juga sosial, budaya dan politik. Seseorang atau keluarga miskin bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lain, seperti mengalami kecatatan, pendidikan yang rendah atau tidak memiliki kemampuan dan keterampilan mengembangkan potensi diri untuk membangun usaha, tidak tersedianya lapangan kerja, terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PKH), dan faktor yang berkaitan lainnya. karena sifat multidimensional tersebut maka kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan sosial. Kemiskinan pada dimensi ekonomi atau material, dimensi ini mengakar dalam berbagai kebutuhan dasar manusianya yang sifatnya material, seperti pangan, sandang papan dan kesehatan. Selanjutnya dimensi sosial dan budaya, pada dimensi ini lapisan masyarakat yang secara ekonomis miskin akan membentuk kantong

kantong kebudayaan yang di sebut budaya kemiskinan demi kelangsungan hidup kemudian yang terakhir kemiskinan berdimensi struktural atau politik, kemiskinan ini terjadi karena orang miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik sehingga dapat menduduki struktur sosial yang paling bawah.

Menurut pandangan umum dimensi pendidikan yang rendah dianggap sebagai akar kemiskinan itu sendiri, dari dimensi kesehatan rendahnya mutu kesehatan masyarakat menyebabkan kemiskinan, dari dimensi ekonomi kepemilikan alat-alat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan yang dimiliki menjadi alasan dasar suatu kemiskinan dapat terjadi. Faktor kultur dan struktural kerap kali dilihat sebagai elemen penting yang menentukan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan di Indonesia semakin membuat jutaan orang menderita karena kesulitan untuk mengakses pelayanan publik baik pelayanan pendidikan maupun pelayanan kesehatan karena keterbatasan biaya hidup, kurangnya lapangan pekerjaan, dan kurangnya jaminan sosial keluarga sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

Upaya pemerintah untuk meminimalisir permasalahan sosial khususnya kemiskinan pemerintah indonesia mempunyai berbagai upaya mulai dari program penanggulangan berbasis pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan yang berbasis pemberdayaan seperti usaha kecil atau mikro. Salah satu penanggulangan kemiskinan yang berbasis bantuan sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).

Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan sejak tahun 2018 pemerintah indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program

perlindungan sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *conditional cash transfer* (CCT), bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM). Persyaratan yang ditetapkan dalam PKH terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, karena dengan kesehatan yang terjamin maka pendidikan juga dapat berjalan dengan baik, dan dengan pendidikan yang layak maka kualitas dari SDM akan meningkat. Kedua komponen ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemiskinan yang saling berpengaruh.

Program Keluarga Harapan (PKH) dijalankan sebagai pelaksanaan UU No. 40 tahun 2004 tentang jaminan sosial, UU No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Inpres No.3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, Perpres No.15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil atau menyusui anak berusia nol sampai dengan enam tahun. komponen pendidikan dengan kriteria dengan anak SD atau sederajat, anak SMA atau sederajat dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang stabilitas berat.

Salah satu tujuan akhir program keluarga harapan (PKH) adalah meningkatkan angka partisipasi sekolah bagi anak-anak RTSM, khususnya SD dan SMP serta untuk mengurangi pekerja di bawah umur di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, program keluarga harapan (PKH) pendidikan berupaya memotivasi RTSM agar mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah dan mendorong mereka untuk memenuhi komitmen kehadiran dalam proses belajar, minimal 85% dari hari efektif sekolah dalam sebulan, selama tahun ajaran berlangsung. Namun, perlu disadari bahwa tidak semua rakyat bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas. Lapisan masyarakat menengah kebawah banyak yang tidak mengenyam pendidikan. Hal tersebut disebabkan mereka tidak memiliki biaya untuk dapat mengakses pendidikan. Meskipun telah banyak strategi yang digunakan untuk meningkatkan akses sekolah, seperti beasiswa miskin, Bantuan Operasional Siswa (BOS) akan tetapi partisipasi sekolah di Indonesia masih belum optimal khususnya bagi anak-anak RTSM. Program Keluarga Harapan dapat memberikan peluang yang lebih baik kepada anak-anak dalam mengakses pelayanan pendidikan. Hal ini sangat dimungkinkan sebab dengan adanya bantuan program ini anak-anak RTSM yang menjadi peserta program keluarga harapan akan lebih mudah mengakses pendidikan yang tersedia.

Untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di Desa Kufeu Kecamatan Io Kufeu khususnya masalah fakir dan miskin, maka pemerintah setempat melalui dinas sosial menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Desa Kufeu. Salah satu program yang khusus dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan

kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini di laksanakan salah satu instansi pemerintahan di bidang sosial.

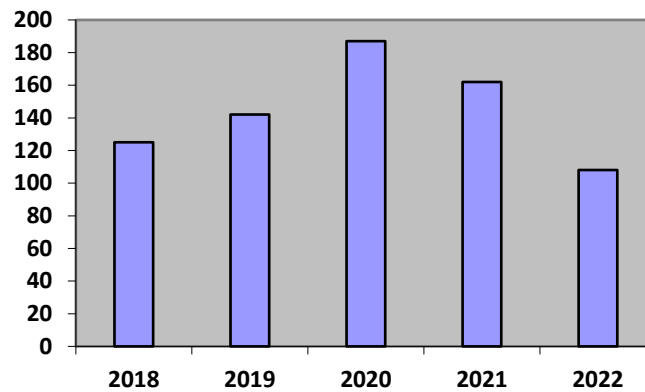
Program keluarga harapan (PKH) diharapkan mendorong perubahan perilaku masyarakat Desa Kufeu menjadi bersekolah dan mengakses fasilitas kesehatan. Hal ini sejalan dengan tujuan awal pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berarti apakah bantuan yang di terima Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) digunakan untuk hal yang menunjang tujuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Pada dasarnya seluruh alur pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dilapangan diambil alih oleh pendamping PKH. Dan untuk tim sekretariat hanya membantu pendamping PKH dalam berkoordinasi dengan pihak pihak penyedian layanan baik kesehatan dan juga pendidikan, tim sekertariat juga membantu pendamping PKH untuk alur informasi dari kecamatan sampai kepada pusat, serta tim sekretariat menjadi penilaian pelaksanaan pendamping PKH selain kementrian sosial dalam bentuk laporan pelaksanaan yang diberikan oleh pendamping PKH kepada tim sekertariat.

Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2017 menyatakan masalah kemiskinan paling besar terjadi di pedesaan. Semakin jauh dari terpencil lokasi sebuah Desa dari kota, maka akan semakin sulit bagi penduduk desa tersebut untuk mendapatkan barang dengan harga yang murah. Sementara sumber daya ekonomi yang ada di wilayah tersebut juga sangat terbatas. Hal ini menyebabkan tingkat kesejahteraan di wilayah Desa atau pinggiran tidak mengalami peningkatan (Sunariyah, 2017).

Jumlah penduduk miskin di Desa Kufeu dari tahun 2018 sampai 2022 berubah-ubah hingga mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020. Jumlah penduduk miskin di Desa Kufeu tahun 2018 sebanyak 124 jiwa, tahun 2019 sebanyak 142 jiwa, tahun 2020 sebanyak 187 jiwa, tahun 2021 sebanyak 156 jiwa, dan tahun 2022 sebanyak 118 jiwa. Jumlah keseluruhan penduduk miskin di Desa Kufeu dari tahun 2018- 2022 sebanyak 727 jiwa.

Grafik 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Di Desa Kufeu Tahun 2018- 2022



Sumber data : Diolah penulis (2023)

Di Desa Kufeu, Kecamatan Io Kufeu, Kabupaten Malaka mengajukan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2017, sedangkan implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Kufeu pada tahun 2018. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pihak UPKH (Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan) Desa Kufeu, terdapat empat dusun yang memiliki jumlah terbesar keluarga yang masuk kedalam kategori keluarga sangat miskin (KSM) diantaranya adalah dusun Oefeu (78 KSM), Dusun Fatuknutuk B (55 KSM), Dusun Fatuknutuk C (78 KSM), Dusun Neofkera (81 KSM). Di Desa Kufeu, Kecamatan Io Kufeu, Kabupaten Malaka merupakan salah satu dari ke empat dusun dengan jumlah KSM sangat

banyak di Desa Kufeu sehingga pengimplementasian Program Keluarga Harapan (PKH) perlu dilakukan di Desa ini dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan bahkan dapat memutuskan rantai kemiskinan.

Tabel 1.1
Kategori Keluarga sangat Miskin Penerima Manfaat PKH Tahun 2018-2022

No	Dusun	Jumlah
1	Oefeu	78 Orang
2	Fatuknutuk B	55 Orang
3	Dusun Fatuknutuk C	78 Orang
4	Neofkera	81 Orang
Total		292 Orang

Sumber: Diolah Penulis, 2023

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di daerah penelitian tingginya antusias masyarakat untuk menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial antara masyarakat yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan masyarakat yang bukan peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu ada pula beberapa masyarakat menyatakan bahwa terdapat peserta Program Keluarga Harapan yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini menimbulkan dugaan di kalangan masyarakat setempat bahwa penyaluran dana PKH di Desa Kufeu belum tepat sasaran. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan belum sesuai prosedur.

Pendamping selalu mengadakan pertemuan kelompok secara rutin, pemutakhiran data, verifikasi komitmen, dan pembayaran bantuan kepada peserta PKH. Dari faktor isi dan konteks kebijakan dimana isi kebijakan terdiri dari kepentingan yang mempengaruhi tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, pelaksana program dan sumber daya digunakan, sedangkan faktor konteks

kebijakan terdiri atas kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat, serta kepatuhan dan daya tanggap.

Tabel 1.2
Jumlah Penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH)
Tahun 2018 -2022

NO	DUSUN	Jumlah KK	Jumlah Orang
1	Oefeu	27 KK	78 Orang
2	Fatuknutuk B	20 KK	55 Orang
3	Fatuknutuk C	30 KK	78 Orang
4	Neofkera	35 KK	81 Orang
Total		112	292 Orang

Sumber: Diolah penulis (2023)

Adapun pembagian jumlah kategori penerima program keluarga harapan (PKH) Desa kufeu adalah:

Tabel 1.3
Jumlah kategori komponen Penerimaan
Program Keluarga Harapan (PKH)
Tahun 2018 -2022

No	Kategori Komponen Penerima PKH Tahun 2018 - 2022	Jumlah
1	Bayi Balita	100
2	Ibu Hamil	93
3	Lansia	99
Total		292

Sumber : Diolah penulis (2023)

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kufeu di laksanakan sejak tahun 2018 dan sudah berjalan selama 5 tahun diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu kesejahteraan sosial khususnya dalam komponen pendidikan yaitu untuk mengurangi angka putus sekolah dan untuk meningkatkan wajib belajar selama 12 tahun.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut melalui penelitian ilmiah dengan judul: **IMPLEMENTASI PROGRAM**

KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA KUFEU, KECAMATAN IO KUFEU, KABUPATEN MALAKA.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka di rumuskan masalah sebagai berikut: **Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kufeu, Kecamatan Io Kufeu, Kabupaten Malaka?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kufeu, Kecamatan Io, Kufeu Kabupaten Malaka

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya adalah:

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat untuk ilmu pengetahuan, serta menambah wawasan khususnya untuk ilmu kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH).
- b. Menambah konsep-konsep serta teori tentang implementasi Program Keluarga Harapan (PKH).

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan masukan positif bagi pemerintah Kabupaten Malaka dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), serta dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak Dinas Sosial Kabupaten Malaka untuk meningkatkan peran serta kualitas pelayanan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).
- b. Agar hasil penelitian ini menjadi masukan dan pertimbangan bagi Desa Kufeu, Kecamatan Io Kufeu, Kabupaten Malaka dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).